



PEMBERDAYAAN EKONOMI ANGGOTA KOPERASI PEGAWAI ADABIAH (KOPA) PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ISLAM

Isra Ahmadi¹

¹Magister UIN Imam Bonjol Padang

e-mail:

Abstract

Economic empowerment is seen as an effort to build community power by encouraging, motivating, and raising awareness of its economic potential and striving to develop it. This study aims to reveal how the actual economic empowerment carried out by the management of the Adabiah Employee Cooperative (KOPA) towards its members is analyzed based on the perspective of empowering the Islamic community through the takwin or formation stage, the tanzim or development and structuring stage, and the taudi 'stage or the release stage and independence. This article was prepared using a qualitative method through a field study approach. This article contains forms of cooperative management and the obstacles faced by the management in empowering the economies of members of the Adabiah Employee Cooperative (KOPA). This research is expected to be a reference for cooperative administrators, foundation administrators, and empowerment agents in carrying out economic empowerment for cooperative members, employees and the Islamic society.

Keywords: empowerment, KOPA, Islamic society

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi dipandang sebagai upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) terhadap anggotanya yang dianalisis berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat Islam melalui tahap *takwin* atau tahap pembentukan, *tanzim* atau tahap pembinaan dan penataan, dan tahap *taudi'* atau tahap keterlepasan dan kemandirian. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi lapangan. Artikel ini berisi tentang bentuk-bentuk pengelolaan koperasi dan kendala yang dihadapi pengurus dalam memberdayakan ekonomi anggota Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengurus koperasi, pengurus yayasan, dan agen pemberdayaan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap anggota koperasi, karyawan serta masyarakat Islam.

Kata kunci: pemberdayaan, KOPA, masyarakat Islam

A. Pendahuluan

Secara sederhana, Theresia dkk (2014: 115) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian, menurut Anwas (2014: 117) pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, dan terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihan-pilihannya, dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupannya.

Berdasarkan definisi Theresia tersebut dapat dicermati bahwa inti dari kegiatan pemberdayaan adalah untuk memberikan daya, kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan kepada masyarakat yang akan diberdayakan sesuai dengan kapasitas (kemampuan) yang mereka miliki. Kemudian berdasarkan definisi Anwas, pemberdayaan juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhannya dan sebagainya, yang mesti dilakukan oleh fasilitator pemberdayaan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa menggarap keuntungan dari masyarakat demi tercapainya kesejahteraan kehidupan

mereka ke arah yang lebih baik secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pemberdayaan yang sering dikenal dengan istilah *empowerment* merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk memberikan *power* (daya, kekuatan, tenaga, kemampuan dan kekuasaan) kepada individu maupun kelompok dengan meningkatkan partisipasi masyarakat secara utuh demi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan kehidupan mereka; baik dari aspek ekonomi, pendidikan, dan spiritual ataupun aspek-aspek lainnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Namun, dalam penelitian ini hanya membahas tentang pemberdayaan ekonomi saja. Hal ini dikarenakan, kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) Padang hanya berbentuk kegiatan pada aspek ekonomi masyarakat saja. Akan tetapi, untuk menjelaskan permasalahan ini lebih lanjut, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang makna pemberdayaan ekonomi tersebut secara teoritis.

Pemberdayaan ekonomi dipandang sebagai upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional (Mubyarto, 2000: 263-264).

Agar tercapainya keberhasilan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut menurut perspektif Islam, merujuk pada pendapat Amrullah Ahmad bahwa pemberdayaan tersebut mesti dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pertama; *takwin* atau pembentukan, tahap kedua; *tanzim* atau pembinaan dan penataan, dan tahap ketiga; *taudi'* atau keterlepasan dan kemandirian (Ahmad, 1992: 67).

Penjelasan ketiga tahapan pemberdayaan masyarakat tersebut yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu:

1. Pada tahap *takwin*, Rasulullah SAW menerapkan kegiatan pemberdayaan melalui *dakwah bi al-lisan* sebagai sosialisasi akidah, *ukhuwah* (ikatan persaudaraan), dan *ta'awun* (kerjasama). Proses sosialisasi dimulai dari unit terkecil dan terdekat sampai pada perwujudan kesepakatan-kesepakatan. Sasaran pertama tahap ini adalah terjadinya internalisasi Islam dalam kepribadian masyarakat. Pada tahap ini Rasulullah SAW telah dapat mempersatukan para sahabat dan masyarakat Islam.
2. Tahap *tanzim* merupakan tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Pada tahap ini internalisasi dan eksternalisasi Islam muncul dalam bentuk institusionalisasi Islam secara komprehensif dalam realitas sosial. Rasulullah SAW mulai membina dan menata masyarakat melalui hijrah. Dalam proses hijrah sampai ke Madinah, Rasulullah SAW melakukan beberapa langkah mendasar yaitu, *Pertama*; membangun masjid (Quba dan

Masjid Nabawi), *Kedua*; membentuk lembaga *ukhuwah islamiyah* antara *muhajirin* dan *anshar*, *Ketiga*; membuat Piagam Madinah yang disepakati berbagai suku dan kaum Yahudi.

3. Tahap *taudi'* yaitu keterlepasan dan kemandirian. Pada tahap ini umat telah menjadi masyarakat mandiri dimana masalah agama telah menjadi sarana pembebasan manusia dari kemiskinan, konflik, penindasan atas nama agama dan politik.

Berdasarkan hal ini, untuk mendukung terwujudnya tujuan pemberdayaan masyarakat seperti menjadikan masyarakat berdaya secara mandiri dan berkesinambungan dari segala aspek kehidupannya, termasuk keberdayaan masyarakat Islam pada aspek ekonomi, maka kegiatan pemberdayaan mesti berpedoman pada implementasi kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memberdayakan masyarakat Islam.

Kemudian, berbicara tentang koperasi, maka koperasi yang berkualitas harus memiliki fungsi, peran, dan tujuan yang harus dicapai oleh setiap elemen yang terlibat dalam kegiatan perkoperasian (Hadhikusuma, 2005: 39-44), seperti yang ada dalam pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran Koperasi Indonesia seperti berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Ikut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas

kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam mencapai tujuannya, koperasi harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya. Rasa ini sangat penting, karena tanpa itu, maka tidaklah mungkin ada kerjasama, dan ditunjang pula dengan kesadaran pribadi dalam menjalankan sebuah perniagaan yang pada intinya bertujuan untuk memberdayakan para anggota koperasi tersebut.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, koperasi bila dipandang dari berbagai macam versi sangat bermanfaat dan sangat dianjurkan oleh Allah SWT guna mengurangi beban material masyarakat. Dalam *nash* seringkali terungkap mengenai tolong-menolong (*ta'awun*) karena manusia diciptakan dalam dua bentuk yakni makhluk pribadi dan makhluk sosial yang hidup saling tolong-menolong dan tentunya bisa melalui kerjasama.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan, diketahui bahwa kegiatan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA), seperti kegiatan pemberian motivasi, pemberian wawasan dalam mengelola usaha, dan evaluasi dari usaha yang dibuat oleh para anggota untuk memberdayakan ekonomi mereka hanya dilakukan sekali setahun.

Padahal, berdasarkan informasi dari ketua koperasi diketahui bahwa koperasi ini telah dibentuk dan dikembangkan dengan harapan sebagai pusat pelayanan berbagai kegiatan perekonomian yang memiliki fungsi penyediaan dan penyaluran sarana produk kebutuhan sehari-hari dan pemasaran hasil produk. Dimana mereka mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama serta memiliki peranan terhadap pemberdayaan ekonomi anggota seperti dosen, guru, dan pegawai (Depie Barnas, pengurus, wawancara 2019).

Dengan demikian, dari sekian banyak bentuk pengelolaan kegiatan koperasi yang dilakukan oleh pengurus koperasi tersebut, sangat disayangkan sekali hanya sekali setahun dilakukan kegiatan pemberian motivasi, pemberian wawasan dalam mengelola usaha, dan evaluasi dari usaha yang dibuat oleh para anggota untuk memberdayakan ekonomi mereka.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mesti dilakukan untuk mengungkap bagaimana sebenarnya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) terhadap anggotanya (dosen, guru, dan pegawainya masing-masing lembaga) yang dilihat dari bentuk pengelolaan, kendala, dan usaha pengurus koperasi tersebut dalam memberdayakan ekonomi anggotanya, yang dianalisis berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat Islam melalui tahap *takwin* (pembentukan), tahap *tanzim* (pembinaan dan penataan), dan tahap *taudi'* (keterlepasan dan kemandirian).

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field*

research) dengan menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah seperti pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2010: 6). Pendekatan penelitian dengan menggunakan cara deskripsi berarti penggambaran atau pencatatan informasi dan data apa adanya tanpa memasukkan penilaian dari peneliti (Pascasarjana IAIN IB Padang, 2014: 35).

Dengan kata lain, penelitian yang penulis gunakan bertujuan untuk menggambarkan atau mencatat informasi dan data sesuai dengan pendapat para sumber (pelaku) tanpa memasukkan interpretasi dan analisis tambahan dari penulis terhadap informasi yang diberikan oleh sumber dengan menggunakan kenyataan sesungguhnya di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Terkait dengan lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu koperasi Yayasan Syarekat Oesaha Adabiah yang terletak di Jl. Jati Adabiah no. 1 yang berada di Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang dengan nama Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA).

3. Penelitian yang relevan

Agar terhindar dari dugaan duplikasi karya ilmiah, maka penulis perlu mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu penelitian tentang “Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat)”.

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode analisis. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa:

1. Faktor yang menjadi pertimbangan terpilihnya Koperasi Jasa Keuangan sebagai lembaga lokal dalam pelaksanaan program PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat di antaranya adalah pengambilan keputusan oleh pemimpin dan anggota, sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi serta mencerminkan prinsip-prinsip partisipasi, dimana masyarakat sebagai anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam organisasi.
2. Peranan Koperasi Jasa Keuangan sebagai lembaga lokal dalam pelaksanaan program PEMK di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat yaitu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hubungan kemitraan dengan Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) PEMK dalam pengelolaan dana bergulir, melaksanakan proses penyaluran, penagihan, dan pengembalian dana bergulir PEMK, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan kegiatan pendampingan kepada masyarakat sebagai anggota dan calon anggota, melaksanakan bisnis koperasi, meliputi kerjasama dengan pihak asuransi (Qodir, 2015).

Berdasarkan hal ini, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaannya terletak pada pendekatan penelitiannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qodir menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisis, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mencatat informasi dan data sesuai dengan pendapat para sumber (pelaku) tanpa memasukkan interpretasi dan analisis tambahan dari penulis terhadap informasi yang diberikan oleh sumber dengan menggunakan kenyataan sesungguhnya di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-bentuk pengelolaan

Pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) yakni berupa kegiatan sosialisasi perekrutan anggota, pemberian motivasi dan wawasan dalam mengelola usaha serta evaluasi dari usaha yang dibuat oleh para anggota untuk memberdayakan ekonomi mereka. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) berikut:

“Bentuk-bentuk pengelolaan koperasi yang kami lakukan yakni berupa kegiatan sosialisasi perekrutan anggota, pemberian motivasi, pemberian wawasan dalam mengelola usaha, dan evaluasi dari usaha yang dibuat oleh para anggota untuk memberdayakan ekonomi mereka. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan undangan kepada calon anggota. Pemberian motivasi dilakukan dengan cara

penambahan modal usaha, meskipun anggota belum selesai melunasi pinjamannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Pemberian wawasan dilakukan dengan cara penambahan pengetahuan anggota dalam mengelola usahanya seperti kemasan barang produksi yang selalu menarik. Kegiatan evaluasi dilakukan ketika raker sekali setahun, dan kegiatan tersebut dilakukan pada bulan Januari atau Februari” (Depie Barnas, pengurus, wawancara 2019)

Hal ini dibenarkan oleh pengurus lain yakni:

“Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang calon anggota berkumpul di gedung yayasan. Pemberian motivasi dilakukan berupa penambahan modal usaha untuk meningkatkan produktifitas anggota koperasi dalam mengelola usahanya. Pemberian wawasan dilakukan dengan cara penambahan pengetahuan anggota dalam mengelola usahanya seperti peningkatan kualitas pelayanan usaha. Kegiatan evaluasi dilakukan ketika raker pada bulan Januari atau Februari yang dilakukan sekali setahun” (Darwita Darwis dan Marjohan, pengurus, wawancara 2019)

Refni yang merupakan anggota Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) menjelaskan bahwa:

“Sosialisasi dilakukan dengan mengundang calon anggota untuk bergabung dengan KOPA. Motivasi yang diberikan pada kami berupa penambahan modal usaha jika usaha tersebut sukses dilakukan dan mengalami perkembangan yang cukup baik. Pemberian

wawasan dilakukan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan yang langsung diadakan oleh pengurus dengan mendatangkan narasumber dari pembina koperasi Kota Padang. Kemudian, kegiatan evaluasi dilakukan hanya ketika raker pada bulan Januari atau Februari yang dilakukan sekali setahun dengan membahas tentang perkembangan usaha masing-masing anggota” (Refni, anggota, wawancara 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) yaitu:

- a. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan menyebarkan undangan untuk masing-masing lembaga di lingkungan perguruan kampus Adabiah seperti sekolah, yayasan dan perguruan tinggi. Kemudian pengurus melakukan sosialisasi di gedung pertemuan Yayasan Syarekat Oesaha (YSO) Adabiah. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengajak calon anggota, memberikan pengarahan dengan menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi. Selanjutnya menyampaikan kepada calon anggota terkait keuntungan menjadi anggota koperasi seperti dapat meminjam dana untuk keperluan sehari-hari dan untuk modal usaha. Di samping itu, harga sembako yang ada di koperasi tentu lebih murah dibandingkan di pasar.
- b. Kegiatan pemberian motivasi seperti penambahan modal usaha, meskipun anggota belum selesai melunasi pinjamannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Pemberian motivasi dalam bentuk lain yakni berupa

kata-kata penyemangat seperti “tidak pernah berputus asa dalam mengelola usaha, meskipun sering mengalami kegagalan”. Kegiatan pemberian wawasan dalam mengelola usaha dengan cara penambahan pengetahuan anggota dalam mengelola usahanya seperti kemasan barang produksi yang selalu menarik dan selalu menjaga kebersihan.

- c. Kegiatan evaluasi dilakukan melalui raker sekali satu tahun dengan membahas komitmen anggota dalam pembayaran pinjaman dan evaluasi tentang tingkat keberhasilan usaha yang dikelola. Disamping itu melalui kebijakan simpanan wajib bagi anggota. Simpanan wajib tersebut berguna untuk masa depan usaha anggota yang mengalami kegagalan.

Akan tetapi, pengelolaan tersebut masih sangat minim dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal tersebut, anggota dan calon anggota koperasi mengatakan bahwa:

“Kegiatan pengelolaan Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) memang telah dilakukan oleh pengurus. Kegiatan tersebut seperti kegiatan sosialisasi perekrutan anggota, kegiatan pemberian motivasi dan pemberian wawasan serta kegiatan evaluasi terhadap perkembangan usaha anggota Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA). Namun hal tersebut masih terasa kurang, karena hal tersebut sangat jarang sekali dilakukan” (Siti Bahari, anggota, wawancara 2019).

Calon anggota koperasi ikut berkomentar bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan ketika perekrutan anggota koperasi kepada guru, pegawai, dosen, dan

pengurus yayasan seperti menyampaikan persyaratan dan keunggulan jika menjadi anggota koperasi bisa meminjam dana untuk modal usaha. Namun, simpanan wajibnya terlalu besar Rp 150.000 / bulan, sedangkan gaji saya baru Rp. 550.000 dan masih banyak pengeluaran lainnya yang harus saya lakukan. Di samping itu, setiap anggota baru bisa meminjam dalam jangka waktu 3 bulan setelah membayar simpanan wajib. Sementara, pinjaman yang akan diberikan hanya Rp. 500.000 tidak boleh lebih. Tentunya uang tersebut belum bisa digunakan untuk membuka usaha karena sangat minim” (Meri Susanti, calon anggota, wawancara 2019).

Anggota Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) lainnya menambahkan bahwa:

“Kegiatan pemberian motivasi yang dilakukan melalui penambahan modal tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan anggota koperasi. Kemudian kegiatan pemberian wawasan melalui pelatihan kewirausahaan sangat jarang dan tidak menentu dilakukan oleh pengurus. Kegiatan evaluasi terhadap perkembangan usaha anggota tidak pernah diawasi secara langsung oleh pengurus ke tempat usaha masing-masing anggota. Pengurus selama ini hanya bertanya perkembangan usaha anggota saja pada waktu raker, namun kurang memberikan perhatian terhadap kemajuan usaha anggota” (Erna, Murtaziah, Nensi Pebrina, anggota, wawancara 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh

pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) masih belum maksimal. Sebab, pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus sangat minim sekali pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi hanya melalui undangan yang diberikan secara umum yang dipajang di mading sekolah, yayasan dan mading perguruan tinggi Adabiah. Tentunya hal ini tidak akan diketahui oleh semua pegawai, dosen, guru dan pengurus yayasan lainnya. Sebab, tidak semua orang sempat untuk melihat-lihat pengumuman karena kesibukan masing-masing.

Di samping itu, simpanan wajibnya terlalu besar yakni Rp 150.000 / bulan, apalagi setiap anggota baru bisa meminjam dalam jangka waktu 3 bulan setelah membayar simpanan wajib. Sementara, pinjaman yang akan diberikan hanya Rp. 500.000 tidak boleh lebih. Tentunya uang tersebut belum bisa digunakan untuk membuka usaha karena sangat minim. Sehingga hal ini membuat calon anggota membatalkan keinginannya untuk menjadi anggota koperasi.

Kegiatan pemberian motivasi yang dilakukan melalui penambahan modal tidak sesuai dengan harapan anggota koperasi. Kemudian kegiatan pemberian wawasan hanya dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan dan itupun sangat jarang bahkan tidak menentu dilakukan oleh pengurus. Kegiatan evaluasi yang dilakukan pengurus kurang memberikan perhatian terhadap kemajuan usaha anggota dan tidak memberikan jalan keluar dari permasalahan usaha yang dijalankan oleh anggota.

Kemudian, jika dilihat melalui perspektif pemberdayaan masyarakat Islam yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap *takwin* (pembentukan), tahap *tanzim* (pembinaan dan penataan), dan tahap

taudi' (keterlepasan dan kemandirian), maka kegiatan pemberdayaan ekonomi anggota Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) masih belum maksimal dilakukan oleh pengurus koperasi tersebut.

Ditinjau dari tahap *takwin* (pembentukan) anggota Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA), maka pengurus koperasi sudah melakukan sosialisasi kepada anggota, namun tidak semua calon anggota mau bergabung sebagai anggota koperasi tersebut. Sebab, pinjaman yang ditawarkan sangat kecil sekali yakni Rp 500.000 dan iurannya juga besar menurut mereka. Oleh karena itu, calon anggota tersebut memilih untuk tidak bergabung.

Kemudian, ditinjau dari tahap *tanzim* (pembinaan dan penataan) anggota koperasi hanya dilakukan berupa kegiatan pemberian motivasi, pemberian wawasan dalam mengelola usaha yang hanya dilakukan sekali setahun ketika rapat kerja antara pengurus dan anggota koperasi.

Jika dilihat dari perspektif pemberdayaan, pemberian motivasi dan pemberian wawasan tidak cukup hanya dilakukan sekali setahun. Sebab, pemberdayaan yang akan mampu membuat masyarakat berdaya secara mandiri dan berkesinambungan harus dilakukan sesering mungkin oleh agen pemberdayaan, termasuk pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA).

Selanjutnya, jika ditinjau dari tahap *taudi'* (keterlepasan dan kemandirian) anggota koperasi dalam memberdayakan diri mereka terkait aspek ekonominya, maka banyak usaha mereka yang tidak berkembang, bahkan ada yang sampai berhenti berwirausaha disebabkan kurang memiliki wawasan dan kurang berpengalaman dalam berwirausaha. Tentunya, hal tersebut terjadi karena kurangnya evaluasi dari

pengurus koperasi terhadap pengelolaan usaha yang dilakukan oleh anggota koperasi.

Hemat penulis, hal tersebut terjadi karena ketiga tahap pemberdayaan tersebut tidak dilakukan secara maksimal oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA). Buktinya, pada tahap *takwin* (pembentukan) anggota koperasi, tidak semua calon anggota mau bergabung sebagai anggota koperasi tersebut. Sebab, terlalu banyak persyaratan yang menurut mereka terlalu memberatkan mereka untuk bisa meminjam modal yang hanya bernilai Rp 500.000 untuk membuka usaha. Oleh karena itulah, calon anggota tersebut memilih untuk tidak bergabung.

Di samping itu, kurangnya pembinaan dan penataan (*tanzim*) oleh pengurus kepada anggota Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) menyebabkan anggota koperasi kurang memiliki wawasan dan kurang berpengalaman dalam berwirausaha, dan mengakibatkan usaha yang mereka jalani tidak berkembang bahkan ada yang sampai berhenti berwirausaha.

Selanjutnya, anggota koperasi tersebut tentu belum bisa dilepaskan begitu saja dengan usaha yang mereka jalani. Sehingga hal tersebut menyebabkan mereka tidak mandiri dalam mengelola usaha disebabkan kurangnya pembinaan dan penataan (*tanzim*) yang hanya dilakukan sekali setahun oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA).

2. Kendala yang dihadapi

a. Kendala pada tahap *takwin*

Kendala pengurus pada tahap *takwin* (pembentukan) anggota Koperasi Pegawai Adabiah tergambar dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi. Di

antaranya hasil wawancara dengan ketua koperasi sebagai berikut:

“Tahap pembentukan keanggotaan pada awalnya dilakukan dengan cara mengundang karyawan, guru, dosen dan pengurus yayasan untuk hadir ke gedung yayasan. Hal tersebut kami lakukan dengan cara memberikan undangan secara umum melalui pengumuman yang diberikan kepada perwakilan setiap unit kantor yang ada di lingkungan perguruan kampus Adabiah. Namun tidak semua dari mereka yang datang untuk memenuhi undangan tersebut. Sehingga, kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk merekrut anggota koperasi dilakukan seadanya dengan jumlah ± 30 orang. Tentu jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan guru, dosen dan karyawan ± 2500 orang yang ada di lingkungan perguruan kampus Adabiah” (Depie Barnas, pengurus, wawancara 2019).

Selanjutnya, pengurus yang lain juga menjelaskan bahwa:

“Kendala lain yang dirasa sangat menghalangi terjadinya proses sosialisasi dalam merekrut calon anggota yakni ketika calon anggota yang sudah datang untuk mendengarkan sosialisasi beranggapan kalau keuntungan yang ditawarkan oleh koperasi tidak begitu menggiurkan dan persyaratannya mereka anggap terlalu berat. Ada beberapa orang calon anggota ketika sosialisasi awal dilakukan beranggapan bahwa persyaratan untuk menjadi anggota terlalu berat dan

jumlah pinjamanpun terlalu sedikit (Darwita Darwis, pengurus, wawancara 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) tersebut, dapat dianalisa bahwa proses pembentukan anggota telah dilakukan yakni dengan cara sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang seluruh karyawan, guru, dosen dan pengurus yayasan untuk hadir ke gedung yayasan. Akan tetapi, tidak banyak karyawan, guru, dosen dan pengurus yayasan yang menghadiri undangan tersebut. Sehingga ketidakhadiran tersebut menjadi kendala yang tidak dapat dihindari oleh pengurus koperasi.

Kendala yang sangat terasa sulit dihadapi oleh pengurus koperasi adalah mengajak karyawan, guru, dosen dan pengurus yayasan untuk menghadiri sosialisasi. Sebab, berbagai pendekatan untuk mengajak mereka telah dilakukan, mulai dari memberikan undangan tertulis hingga mengundang melalui pengumuman lewat mikropon sekolah. Namun, tetap saja yang hadir tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai Adabiah. Jika yang hadir hanya 30 orang, maka yang tidak hadir tentu sangat banyak yakni 2470 dari 2500 orang pegawai Adabiah.

Di samping itu, kendala lain yang dihadapi oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) yakni terkait dengan calon anggota yang sudah menghadiri undangan, tapi mereka tidak jadi bergabung sebagai anggota koperasi. Hal tersebut dikarenakan mereka merasa keberatan dengan persyaratan yang ada di koperasi sehingga membuat mereka merasa

kurang tertarik untuk bergabung jadi anggota koperasi. Belum lagi jumlah pinjaman yang akan dipinjamkan terlalu kecil untuk digunakan sebagai modal usaha yakni Rp 500.000. Itupun akan berlaku apabila sudah menjadi anggota selama 3 bulan dengan jumlah iuran wajib Rp 150.000 / bulan.

Dengan demikian, kendala yang dihadapi oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) pada tahap *takwin* (pembentukan) anggota terdiri dari dua bentuk yaitu:

- 1) Kendala dalam mengajak karyawan, guru, dosen dan pengurus yayasan untuk menghadiri sosialisasi seperti memberikan undangan tertulis hingga mengundang melalui pengumuman lewat mikropon sekolah. Namun, tetap saja yang hadir tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pegawai Adabiah. Jika yang hadir hanya 30 orang, maka yang tidak hadir tentu sangat banyak yakni 2470 dari 2500 orang pegawai Adabiah.
- 2) Kendala ketika melakukan sosialisasi bagi calon anggota yang sudah hadir disaat proses sosialisasi dilakukan, yakni terkait dengan calon anggota yang sudah menghadiri undangan, tapi mereka tidak jadi bergabung sebagai anggota koperasi. Hal tersebut dikarenakan mereka merasa keberatan dengan persyaratan yang ada di koperasi sehingga membuat mereka merasa kurang tertarik untuk bergabung jadi anggota koperasi. Belum lagi jumlah pinjaman yang akan dipinjamkan terlalu kecil untuk

digunakan sebagai modal usaha yakni Rp 500.000. Itupun akan berlaku apabila sudah menjadi anggota selama 3 bulan dengan jumlah iuran wajib Rp 150.000 / bulan.

b. Kendala pada tahap *tanzim*

Kendala pengurus pada tahap *tanzim* (pembinaan dan penataan) ini penulis uraikan berdasarkan pembinaan dan penataan yang telah dilakukan oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA). Hal tersebut tergambar dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pengurus koperasi yakni:

“Bentuk pembinaan dan penataan yang dilakukan oleh pengurus yakni berupa pemberian motivasi dan pemberian wawasan dalam mengelola usaha anggota. Pemberian motivasi dilakukan dengan cara penambahan modal usaha, meskipun anggota belum selesai melunasi pinjamannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Namun, setelah waktu berjalan, anggota koperasi tersebut ketika mereka diberhentikan oleh yayasan karena ada masalah, malah mereka tidak mau melunasi pinjaman tersebut dengan alasan karena mereka telah dipecat oleh yayasan. Sehingga mereka beranggapan tidak lagi bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman tersebut. Kemudian, pemberian wawasan dilakukan dengan cara penambahan pengetahuan anggota dalam mengelola usahanya melalui raker tahunan, akan tetapi anggota tersebut banyak yang tidak datang. Jika seperti itu yang terjadi, maka proses pemberian motivasi dan wawasan tidak berjalan dengan

lancar (Depie Barnas, wawancara 2019).

Permasalahan tersebut dibenarkan oleh pengurus lainnya yakni:

“Memang benar kami sebagai pengurus telah melakukan kegiatan pembinaan dan penataan anggota koperasi melalui raker tahunan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan penambahan modal usaha, meskipun anggota belum selesai melunasi pinjamannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi amanat yang kami berikan kepada anggota tersebut tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Buktinya, pada tahun 2015 lalu ada 14 orang anggota yang diberhentikan oleh yayasan dan mereka tidak mau melunasi pinjaman tersebut karena mereka tidak terima diberhentikan oleh yayasan. Jika seperti itu yang terjadi, tentu pemberian motivasi seperti ini menjadi kendala yang mesti segera diselesaikan oleh kami sebagai pengurus. Kemudian, pemberian wawasan yang dilakukan oleh pengurus juga terkendala dengan kehadiran anggota yang tidak maksimal. Sehingga, pelaksanaan kegiatan pemberian motivasi dan wawasan tentu tidak berjalan dengan lancar karena ketidakhadiran anggota tersebut (Darwita Darwis dan Marjohan, pengurus, wawancara 2019).

Nefrida sebagai pengurus juga mengungkapkan bahwa:

“Pemberian wawasan dalam bentuk lain juga telah dilakukan oleh pengurus dengan cara mengadakan acara seminar atau pelatihan kewirausahaan. Namun,

tetap saja anggota tersebut banyak yang tidak hadir. Kami sebagai pengurus merasa kewalahan menghadapi hal ini. Belum lagi masalah dengan pengurus yayasan yang tidak begitu memperhatikan perkembangan koperasi. Sehingga, komunikasi pengurus dengan yayasan tidak begitu baik, dan ini sangat berdampak buruk bagi perkembangan koperasi yang jelas dinaungi oleh pengurus yayasan (Nefrida, pengurus, wawancara 2019).

Kemudian, kendala berikutnya juga diungkapkan oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA) dengan mengatakan:

“Sebenarnya masih banyak kendala lain yang dihadapi oleh pengurus koperasi. Di antaranya, ketika kami sebagai pengurus mengajak pengurus yayasan untuk bekerjasama dalam bentuk penambahan modal kepada koperasi. Akan tetapi pengurus yayasan menolak dengan alasan koperasi tidak sanggup memberikan dana cepat kepada pengurus yayasan apabila dibutuhkan. Oleh karena itu, kami sebagai pengurus koperasi menjalin kerjasama dengan Bank Nagari untuk pinjaman modal tambahan yang akan dipergunakan oleh anggota koperasi. Namun, ketika pinjaman kepada Bank tersebut telah jatuh tempo, sementara anggota masih banyak yang belum melunasi pinjamannya kepada koperasi, maka terpaksa kami menanggulangi hal tersebut dengan menggunakan uang pribadi. Jika hal ini terus terjadi, maka hal ini akan mengancam perkembangan Koperasi Pegawai

Adabiah (KOPA) (Depie Barnas dkk, pengurus, wawancara 2019).

“Kendala lainnya yang saya hadapi sebagai pengurus adalah tidak adanya kekompakan pengurus-pengurus lainnya dalam menjalankan program-program yang telah disepakati secara bersama ketika rapat anggota tahunan dilaksanakan, seperti mengajukan penawaran kepada pengurus yayasan untuk pengadaan seragam sekolah, menghibau anggota koperasi untuk berbelanja pada unit konsumsi, menambah usaha pada unit konsumsi berupa usaha foto copy dan lain sebagainya (Depie Barnas, wawancara 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisa bahwa kendala pada tahap *tanzim* (pembinaan dan penataan) anggota yang dihadapi oleh pengurus koperasi cukup beragam. Di antaranya ketika pengurus memberikan pinjaman tambahan modal kepada anggota dengan tujuan memotivasi anggota, namun, ketika mereka diberhentikan oleh yayasan karena ada masalah, malah mereka tidak mau melunasi pinjaman tersebut dengan alasan karena mereka telah dipecah oleh yayasan. Sehingga mereka beranggapan tidak lagi bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman tersebut.

Kemudian, kendala berikutnya adalah terkait dengan ketidakhadiran anggota dalam pelaksanaan kegiatan raker tahunan dengan tujuan untuk memberikan wawasan kewirausahaan kepada mereka. Jika seperti itu yang terjadi, maka proses pemberian motivasi dan wawasan tidak akan berjalan dengan maksimal karena orang yang akan diberi motivasi tidak hadir dengan lengkap. Meskipun pemberian wawasan dalam bentuk lain juga telah dilakukan oleh pengurus

dengan cara mengadakan acara seminar atau pelatihan kewirausahaan. Namun, tetap saja anggota tersebut banyak yang tidak hadir.

Di samping itu, kendala lainnya yakni pengurus yayasan tidak begitu memperhatikan perkembangan koperasi. Sehingga, komunikasi pengurus koperasi dengan pengurus yayasan tidak begitu baik, dan ini sangat berdampak buruk bagi perkembangan koperasi yang jelas dinaungi oleh pengurus yayasan. Ketika pengurus koperasi mengajak pengurus yayasan untuk bekerjasama dalam bentuk pemberian modal kepada koperasi, akan tetapi pengurus yayasan menolak dengan alasan koperasi tidak sanggup memberikan dana cepat kepada pengurus yayasan apabila dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, pengurus koperasi menjalin kerjasama dengan Bank Nagari untuk mendapatkan pinjaman modal tambahan yang akan dipergunakan oleh anggota koperasi. Namun, ketika pinjaman kepada Bank tersebut telah jatuh tempo, sementara anggota masih banyak yang belum melunasi pinjamannya kepada koperasi, maka terpaksa pengurus koperasi menanggulangi hal tersebut dengan menggunakan uang pribadi.

c. Kendala pada tahap *taudi'*

Berbicara tentang tahap *taudi'* atau tahap keterlepasan dan kemandirian, maka hal ini masih jauh untuk dicapai oleh pengurus koperasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan di Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA). Dengan kata lain, kemandirian dan keberdayaan anggota KOPA dalam memberdayakan aspek ekonomi mereka sangatlah jauh dari kata memadai.

Oleh karena itu, tidak banyak hal yang dapat penulis jelaskan tentang

tahapan keterlepasan dan kemandirian ini. Sebab, anggota koperasi tersebut memang belum mencapai tahap kemandirian ini dalam mengelola usaha yang mereka jalani.

Mereka belum bisa dilepaskan begitu saja dengan usaha yang mereka jalani. Sehingga hal tersebut menyebabkan mereka tidak mandiri dalam mengelola usaha disebabkan kurangnya pembinaan dan penataan (*tanzim*) yang hanya dilakukan sekali setahun oleh pengurus Koperasi Pegawai Adabiah (KOPA).

Di samping itu, hal ini juga berawal dari tahap *takwin* atau tahap awal dalam merekrut dan menarik simpati pegawai di lingkungan kampus Yayasan Syarikat Oesaha (YSO) Adabiah. Banyak diantara mereka yang memilih mundur untuk bergabung dikarenakan besarnya iuran koperasi.

D. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pengelolaan koperasi oleh pengurus KOPA yakni sebagai berikut:
 - a. Melakukan kegiatan sosialisasi dengan menyebarkan undangan untuk masing-masing lembaga di lingkungan perguruan kampus Adabiah seperti sekolah, yayasan dan perguruan tinggi. Kemudian pengurus melakukan sosialisasi di gedung pertemuan Yayasan Syarikat Oesaha (YSO) Adabiah. Sosialisasi dilakukan dengan cara mengajak calon anggota, memberikan pengarahan dengan menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi. Selanjutnya menyampaikan kepada calon anggota terkait keuntungan menjadi anggota koperasi seperti dapat meminjam dana untuk keperluan sehari-hari dan untuk

modal usaha. Di samping itu, harga sembako yang ada di koperasi tentu lebih murah dibandingkan di pasar.

- b. Kegiatan pemberian motivasi seperti penambahan modal usaha, meskipun anggota belum selesai melunasi pinjamannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Pemberian motivasi dalam bentuk lain yakni berupa kata-kata penyemangat seperti “tidak pernah berputus asa dalam mengelola usaha, meskipun sering mengalami kegagalan”. Kegiatan pemberian wawasan dalam mengelola usaha dengan cara penambahan pengetahuan anggota dalam mengelola usahanya seperti kemasan barang produksi yang selalu menarik dan selalu menjaga kebersihan.
 - c. Kegiatan evaluasi dilakukan melalui raker sekali satu tahun dengan membahas komitmen anggota dalam pembayaran pinjaman dan evaluasi tentang tingkat keberhasilan usaha yang dikelola. Disamping itu melalui kebijakan simpanan wajib bagi anggota. Simpanan wajib tersebut berguna untuk masa depan usaha anggota yang mengalami kegagalan.
2. Kendala yang dihadapi oleh pengurus KOPA dalam memberdayakan ekonomi anggota yakni sebagai berikut:
 - a. Kendala dalam mengajak karyawan, guru, dosen dan pengurus yayasan untuk menghadiri sosialisasi seperti memberikan undangan tertulis hingga mengundang melalui pengumuman lewat mikropon sekolah. Namun, tetap saja yang hadir tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan jumlah

keseluruhan pegawai Adabiah. Jika yang hadir hanya 30 orang, maka yang tidak hadir tentu sangat banyak yakni 2470 dari 2500 orang pegawai Adabiah.

- b. Kendala ketika melakukan sosialisasi bagi calon anggota yang sudah hadir disaat proses sosialisasi dilakukan, yakni terkait dengan calon anggota yang sudah menghadiri undangan, tapi mereka tidak jadi bergabung sebagai anggota koperasi. Hal tersebut dikarenakan mereka merasa keberatan dengan persyaratan yang ada di koperasi sehingga membuat mereka merasa kurang tertarik untuk bergabung jadi anggota koperasi. Belum lagi jumlah pinjaman yang akan dipinjamkan terlalu kecil untuk digunakan sebagai modal usaha yakni Rp 500.000. Itupun akan berlaku apabila sudah menjadi anggota selama 3 bulan dengan jumlah iuran wajib Rp 150.000 / bulan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Ahmad, Amrullah. 1992. *Kerangka Teori dan Metodologi Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Proyek. M.I.T.
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.
- Hadhikusuma, Sutanya Rahardja. 2005 *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. RadjaGrapindo Persada.
- Machendrawaty, Nanih dkk. 2001. *Pengembangan Masyarakat Islam; dari Ideologi, Strategi sampai Tradisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Maleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Terj. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,

Mubyarto. 2002 *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.

Theresia, Aprillia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN IB Padang. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*.

Internet:

- Qodir, Abdul. 2015. *Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Peranan Koperasi Jasa Keuangan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kotamadya Jakarta Pusat)*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2015, (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2027148-T29286-Analisis%20kelembagaan.pdf>),